

TESIS

PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

*The Implementation of Measures Against 12-Year-Old Children as
Perpetrators of Criminal Acts from the Perspective
of the Best Interests of the Child*



Oleh:

ERVIYANTI ROSMAIDA

NIM. 2310622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

*The Implementation of Measures Against 12-Year-Old Children as
Perpetrators of Criminal Acts from the Perspective
of the Best Interests of the Child*



Oleh:

ERVIYANTI ROSMAIDA

NIM. 2310622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI
ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ERVYANTI ROSMAIDA

NIM. 2310622022

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Disusun dan diajukan oleh:

ERVİYANTI ROSMAIDA
NIM. 2310622022

Disetujui untuk Tahap UJIAN HASIL PENELITIAN
Pada Tanggal Mei 2025

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,

M.H., M.Tr.Adm.Kes

Nip. 199304282022031009.

Pembimbing 2



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M

Nip. 198709222018031002.



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK
KEPENTINGAN TERBAIK ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:
ERVIYANTI ROSMAIDA
NIM. 2310622022

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 20 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIKD. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Subherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Erviyanti Rosmaida
NIM : 2310622022
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **"PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ERVIYANTI ROSMAIDA

NIM. 2310622022

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervianti Rosmaida

NIM : 2310622022

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ervianti Rosmaida

NIM. 2310622022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan segala kuasa-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, Kaprodi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M selaku Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu dan pemikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H selaku Penguji Pertama dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H selaku Penguji Kedua pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian yang telah memberikan masukan dan arahan guna menyempurnakan penyusunan karya akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
7. Ibu Tuti Nurhayati selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, sebagai narasumber

penulis yang bertugas di Sentra Handayani Jakarta.

8. Bapak terkasih Mangisitua Marbun, SH., M.Hum (Alm) dan Mama terkasih Rosinta Manulang yang adalah Orang Tua Penulis tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
9. Suami tercinta Bernard Manahan Sihombing yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Spesial untuk anak-anak tersayang Fidel Erberd Marupa Sihombing dan Gilberd Halomoan Sihombing yang luar biasa bersabar dan tidak pernah lupa mendoakan Penulis dengan kalimat *"Tuhan Yesus, berkati Mami biar kuliahnya cepat selesai dan dapat nilai yang bagus"*.
11. Sahabat-sahabatku Lusiana, Isti, Christy dan Sekar yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2023 di Program Studi Hukum Program Magister yang selalu saling *support*;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, sehingga dapat menambah referensi ilmu di bidang hukum serta bermanfaat bagi pembaca sekalian. Kiranya semua bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan bernilai ibadah dan diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Juni 2025

Penulis



Ervianti Rosmaida

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

Erviyanti Rosmaida (231062202), Handar Subhandi Bakhtiar, Beniharmoni Harefa

Anak merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa, namun dalam proses tumbuh kembangnya sering kali terlibat dalam pelanggaran hukum tanpa disertai niat jahat. Sayangnya, sistem peradilan pidana kerap belum memberikan perlindungan yang memadai. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak usia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik anak. Penyerahan anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan bentuk tindakan non-penal yang sesuai dengan tujuan pemulihan, bukan penghukuman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan terbatas di LPKS Handayani Jakarta Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam pelaksanaan tindakan terhadap anak usia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah dengan tegas mengatur bahwa anak usia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di tingkat praktis belum sejalan dengan norma tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi lapangan terbatas di LPKS Handayani Jakarta Timur, ditemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak usia 12 tahun belum mendapatkan dukungan struktural dan prosedural yang memadai. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya sinergi yang jelas dan terkoordinasi antar aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Selain itu, belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penyerahan anak ke LPKS, standar rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan diversi sejak tahap pra-adjudikasi, menyebabkan proses hukum berjalan secara tidak seragam dan tidak berbasis pemulihan. Ketiadaan sinergi dan SOP tersebut mengakibatkan proses penanganan anak masih berlangsung secara formalistik dan bahkan represif, di mana anak usia 12 tahun diproses dengan logika penghukuman alih-alih pemulihan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan anak yang menekankan pada perlindungan psikososial, pemulihan karakter, serta integrasi sosial anak. Padahal, LPKS terbukti mampu menjalankan fungsi rehabilitatif secara edukatif, restoratif, dan transformatif bila dilibatkan sejak awal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan urgensi optimalisasi peran LPKS sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan tindakan sosial, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan perlindungan hukum dan pelaksanaan keadilan yang berpihak pada masa depan anak. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral dan penguatan regulasi teknis sebagai dasar implementasi prinsip *the best interest of the child* secara nyata dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: tindakan; anak usia 12 tahun; kepentingan terbaik anak.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MEASURES AGAINST 12-YEAR-OLD CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD

Erviyanti Rosmaida (231062202), Handar Subhandi Bakhtiar, Beniharmoni Harefa

Children are strategic assets for the future of a nation. However, during their developmental phase—characterized by identity exploration—children often become involved in legal violations without malicious intent. Unfortunately, the criminal justice system frequently fails to provide adequate protection. Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) affirms that children aged 12 may only be subjected to non-penal measures, not criminal sanctions, applying a restorative justice approach and the principle of the best interest of the child. Referring children to Social Welfare Organizing Institutions (LPKS) is a non-punitive measure aligned with the goal of rehabilitation rather than punishment. This study employed a qualitative method with a normative juridical approach and limited fieldwork conducted at LPKS Handayani, East Jakarta. The research reveals that the role of LPKS in carrying out rehabilitative actions for 12-year-old children in conflict with the law has not yet been optimized. Although the SPPA Law clearly stipulates that children at this age should only receive rehabilitative measures and promotes restorative justice and the best interest of the child, its practical implementation remains inconsistent with those normative standards. Field findings indicate that the implementation of social rehabilitation lacks adequate structural and procedural support. One of the primary contributing factors is the absence of clear and coordinated synergy among law enforcement actors, including investigators, prosecutors, judges, probation officers, and social workers. Moreover, the lack of a technical Standard Operating Procedure (SOP) that governs the referral process to LPKS, standards for social rehabilitation, and guidelines for diversion from the pre-adjudication stage has led to inconsistent and non-restorative legal practices. This lack of synergy and procedural clarity results in formalistic and even repressive treatment, where 12-year-old children are processed under a punitive logic rather than rehabilitative. Such practices contradict the core principles of juvenile justice, which emphasize psychosocial protection, character recovery, and social reintegration. In contrast, when involved from the outset, LPKS has proven capable of delivering educational, restorative, and transformative rehabilitation. Therefore, the findings underscore the urgency of optimizing the role of LPKS not merely as a social service provider but as a strategic actor in ensuring legal protection and implementing justice that supports the child's future. Cross-sectoral synergy and the reinforcement of technical regulations are urgently needed as the foundation for the real implementation of the best interest of the child principle in the juvenile criminal justice system.

Keywords: measures; children aged 12; best interest of the child.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kajian Teoritis.....	24
1. Teori Double Track System.....	24
2. Teori Kepentingan Terbaik Anak	27
3. Teori Keadilan.....	31
B. Kerangka Pikir	37
C. Definisi Operasional.....	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41

C. Tipe Penelitian.....	42
D. Sifat Penelitian.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Sumber Bahan Hukum Dan Teknik Analisis	46
G. Teknik Analisis	46
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Terhadap Anak Berusia 12 Tahun Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	48
1. Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
2. Pendekatan Tindakan sebagai Substitusi Pemidanaan.	56
3. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	62
4. Aspek Keadilan terhadap Anak Usia 12 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	66
B. Urgensi Optimalisasi Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam pelaksanaan tindakan terhadap anak usia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum.	69
1. Fungsi dan Program LPKS	73
2. Sarana Rehabilitasi dan Pembinaan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	78
BAB V.....	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113